

ABSTRAK

Permasalahan identitas para pendatang selalu terjadi di kota besar seperti Kota Bandung. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung masih banyak para pendatang yang belum mengetahui mengenai pentingnya Surat Keterangan Tinggal Sementara. Alasan mereka tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara adalah kurang pemahaman mengenai Surat Keterangan Tinggal Sementara dan malas untuk mengurus proses pembuatan.

Peneliti melakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan E-Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang bertujuan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi atau Pelaksanaan Kebijakan E-Pendaftaran Penduduk Tidak Permanen serta langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pelaksana kebijakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Syafri Wirman yang menyebutkan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi itu terbagi menjadi enam dimensi, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya (sumber-sumber), komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan kecenderungan pelaksana (sikap implementors).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Implementasi Kebijakan E-Punten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sejauh ini telah berjalan dengan baik meskipun belum mencapai hasil yang diinginkan. Dalam dimensi pertama ukuran dan tujuan kebijakan dirasa sudah tepat dengan sasaran warga pendatang luar kota Bandung seperti mahasiswa dan juga sudah terlaksana dengan baik dimana masyarakat sudah memahami akan pentingnya memiliki surat keterangan tinggal sementara, sumber daya sudah berjalan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan E-Punten, karakteristik kebijakan masih kurang peduli dan memberikan informasi tidak secara merata meskipun memang dalam menjalankan kebijakan E-Punten ini dapat dikatakan telah melakukan yang terbaik, komunikasi badan atau lembaga pelaksana dapat dikatakan sudah baik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkoordinasi dengan kelurahan-kelurahan yang ada di kota Bandung untuk mengetahui perkembangan warga pendatang, kondisi ekonomi sosial dan politik sudah terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya dukungan dari pemerintah dan dukungan dari masyarakat luar kota Bandung yang ingin menetap untuk sementara waktu walaupun masih ada masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya memiliki surat keterangan tinggal sementara, dan yang terakhir dimensi sikap para pelaksana kebijakan para pelaksana dirasa sudah menerapkan kebijakan ini dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, E-Punten, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRACT

The problem of the identity of migrants always occurs in big cities like Bandung. Based on data collected from Department of Population and Civil Registration in Bandung, there are still many migrants who do not know about the importance of Temporary Residence Certificate. The reason they did not have a Temporary Residence Certificate was a lack of understanding and were lazy to take care of the manufacturing proses.

Researchers conducted research on the implementation of E-Registration Policy for Permanent Residents in the Department of Population and Civil Registration of the City of Bandung whose aim is to find out how the implementation or implementation of E-Registration Policy for Permanent residents and what steps are taken by the Government as policy makers and the Population and Civil Registry Office as the executor of the policy.

The research method used in this research is descriptive research method with a qualitative approach, the data collection techniques are observation, interview, and study documentation.

Through the theory used in conducting this research is the model of policy implementation according to Van Meter and Van Horn in Syafri Wirman which states the factors that determine the success of implementation are divided into six dimensions, namely the size and purpose of the policy, resources (sources), communication between organizations and implementation activities, characteristics of implementing agencies, economic, social and political conditions, and tendency of implementers (implementors attitude).

The results of this study indicate that the implementation of the E-Punten policy Implementation in the Department of Population and Civil Registration of the City of Bandung so far has been going well even though it has not yet achieved the desired results. In the first dimensions, the size and objectives of the policy are deemed appropriate with the target of migrants outside the city of Bandung such as students and have also been implemented well where the community already understands the importance of having temporary residence certificate, resources have been running well to improve E-Punten services, the characteristics of the policy are still less concerned and provide uneven information even though in carrying out this E-Punten policy it can be said to have done the best, communication agencies or implementing agencies can be said to have been good the Department of Population and Civil Registration Bandung in coordinating with existing villages in the city of Bandung to find out the development of newcomers, social and political economic conditions have been implemented well this is evidenced by the support of the government and support from people outside the city of Bandung, and the last dimensions of the attitude of the implementers of the policies of the implementers, are considered to have implemented this policy properly and in accordance with applicable regulations.

Key Words : Policy Implementation, E-Punten, Population Office and Civil Registration